BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka terkait Permasalahan

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Menurut Gurning F.P dalam (Pormes et al., 2023) Kebijakan merupakan serangkaian alternatif yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dalam menentukan keputusan yang tepat. Kebijakan juga berperan sebagai pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan suatu tugas, baik dalam kepemimpinan, organisasi, maupun pemerintahan. Dalam upaya mencapai hasil yang diharapkan, kebijakan berfungsi sebagai acuan yang memberikan arahan dalam menetapkan tujuan, merancang strategi dan pengelolaan sumber daya. Sedangkan menurut Anderson dalam (Pormes et al., 2023) kebijakan merupakan tindakan atau rencana yang dibuat oleh individu maupun kelompok dengan tujuan tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah.

Ada banyak definisi kebijakan publik, salah satunya menurut Thomas Dye dalam (Anggara, 2014) mendefinisikan bahwa kebijakan publik mencakup segala tindakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam menetapkan kebijakan , perlu dipertimbangkan alasan penerapannya serta manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas dan nyata. Agar kebijakan tersebut berdampak positif dan tidak menimbulkan kerugian, pemerintah harus mengambil keputusan dengan bijak. Sedangkan menurut Chief J.O Udoji dalam (Wahab, 2017, hal. 14) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *"an santioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large"* (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar masyarakat).

Berdasarkan pandangan dari para ahli, kebijakan publik merupakan langkah atau keputusan yang diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang berdampak luas pada masyarakat. Perumusan kebijakan harus didasarkan pada alasan yang jelas serta memberikan manfaat nyata. Kebijakan memiliki tujuan yang terarah dan saling berkaitan agar menjadi solusi efektif tanpa menimbulkan dampak negatif.

b. Proses kebijakan publik

Proses kebijakan merupakan serangkaian langkah yang sistematis dan terencana untuk mengatasi masalah sosial melalui pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Proses kebijakan Publik melibatkan berbagai pihak, termasuk politisi, lembaga pemerintah, pembuat keputusan, serta kelompok kepentingan lainnya.

Menurut Thomas R. Dye (Prabawati et al., 2019) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal:

1) Identifikasi masalah kebijakan *(Identification of policy problem)*

Proses ini melibatkan penentuan isu atau permasalahan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Membantu dalam memahami isu-isu yang perlu diatasi.

2) Penyusunan agenda *(Agenda setting)*

Tahapan ini merupakan upaya untuk menarik perhatian pejabat publik dan media terkait isu-isu tertentu yang memerlukan keputusan.

3) Perumusan kebijakan *(Policy formulation)*

Merancang rekomendasi kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang telah masuk dalam agenda dengan kelompok kepentingan, pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.

4) Pengesahan kebijakan (legitimating of policies)

Rekomendasi kebijakan yang telah dipilih disahkan melalui tindakan politik oleh lembaga resmi.

5) *Implementasi kebijakan (policy implementation)*

Tahapan ini mulai diterapkan, dilakukan melalui birokrasi, anggaran negara dan aktivitas terstruktur dari lembaga-lembaga-lembaga pelaksana.

6) *Evaluasi kebijakan (policy evaluation)*

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan mencapai tujuan yang diharapkan atau perlu perbaikan. Penilaian dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, konsultan di luar pemerintah, media massa, dan masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan

a. Definisi Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Anggara, 2014:232), implementasi merupakan upaya yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok dari sektor pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Sedangkan menurut George C. Edwards III dalam (Anggara, 2014:249), implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan yang terletak di antara tahap perumusan kebijakan dan dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut, baik dalam bentuk output maupun outcome.

Implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan setelah disahkan, dengan tujuan mengelola berbagai sumber daya dan menghasilkan output serta manfaat nyata bagi masyarakat. Implementasi kebijakan menurut jones (1996) menyebutkan implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai rangkaian langkah-langkah yang dilakukan untuk menjalankan suatu program dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan (Dela Rosita Sari et al., 2024).

b. Model Implementasi kebijakan

Ada beberapa model yang dikemukakan oleh para ahli dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016), yaitu:

1) Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn mengembangkan model implementasi kebijakan "A Model of the Policy Implementation process." Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik kebijakan itu sendiri. Mereka menghubungkan kebijakan dengan pelaksanaan serta kinerja, dengan menekankan pentingnya perubahan, kontrol, dan kepatuhan dalam proses implementasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn keberhasilan kebijakan dalam mencapai kinerja yang diharapkan dipengaruhi oleh enam faktor utama:

a) standar dan tujuan kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan merupakan landasan utama dalam proses implementasi. Standar ini berisi arah dan sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan yang telah dirumuskan oleh para pembuat kebijakan. Agar implementasi berjalan efektif, tujuan kebijakan harus jelas, spesifik, dan tidak menimbulkan banyak tafsir. Standar yang baik juga harus dapat diukur dan menjadi acuan dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

b) Sumber daya kebijakan

Ketersediaan sumber daya sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup dana, tenaga manusia, informasi, fasilitas, serta waktu yang memadai. Meskipun kebijakan dirancang dengan baik, tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kebijakan tersebut sulit diimplementasikan secara optimal. Misalnya, kurangnya tenaga ahli atau dana yang terbatas akan

menghambat pelaksanaan program-program kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia sesuai kebutuhan.

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana adalah instansi atau organisasi yang bertanggung jawab langsung dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Karakteristik dari agen ini, seperti struktur organisasi, kapasitas staf, gaya kepemimpinan, budaya kerja, serta hubungan dengan pembuat kebijakan sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan. Jika agen pelaksana memiliki struktur yang tidak fleksibel atau staf yang tidak kompeten, maka pelaksanaan kebijakan cenderung tidak berjalan sebagaimana mestinya.

d) Komunikasi antar organisasi

Komunikasi yang efektif antar organisasi dalam proses implementasi kebijakan sangat penting. Tujuan dan arahan kebijakan harus disampaikan dengan jelas, tepat, dan konsisten kepada pelaksana. Selain itu, komunikasi harus bersifat dua arah, dimana pelaksana juga dapat memberikan masukan atas kendala di lapangan. Dalam proses ini, penting juga adanya mekanisme penegakan seperti monitoring, evaluasi, pemberian insentif, atau sanksi. Mekanisme ini diperlukan untuk memastikan pelaksana menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan kebijakan. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik atau mekanisme pengawasan lemah, maka pelaksanaan kebijakan berpotensi menyimpang.

e) Lingkungan sosial, lingkungan, dan politik.

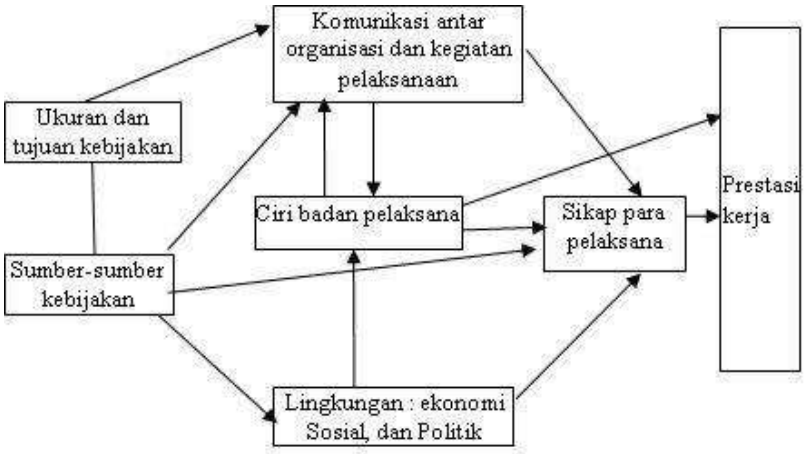
Lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi. Kondisi sosial, seperti tingkat

pendidikan dan partisipasi masyarakat; kondisi ekonomi, seperti kemampuan fiskal daerah; serta kondisi politik, seperti dukungan dari elite lokal dan stabilitas pemerintahan, semuanya akan mempengaruhi jalannya implementasi. Misalnya, jika masyarakat mendukung kebijakan dan ada tekanan politik yang positif, maka pelaksana akan lebih mudah menggerakkan program. Sebaliknya, jika kebijakan bertentangan dengan kepentingan kelompok tertentu atau situasi politik tidak mendukung, maka pelaksanaan bisa terhambat.

f) Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana merujuk pada sikap, pemahaman, dan komitmen para pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Jika pelaksana memahami maksud kebijakan dengan baik dan memiliki sikap yang positif terhadap tujuan kebijakan, maka mereka cenderung melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Namun, jika pelaksana merasa kebijakan bertentangan dengan nilai pribadi atau kepentingan institusinya, maka mereka bisa menunjukkan resistensi atau bahkan mengabaikan kebijakan tersebut. Karena itu, penting untuk memastikan bahwa para pelaksana diberi pemahaman yang cukup dan dilibatkan sejak awal agar merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan kebijakan.

Gambar 1
Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn



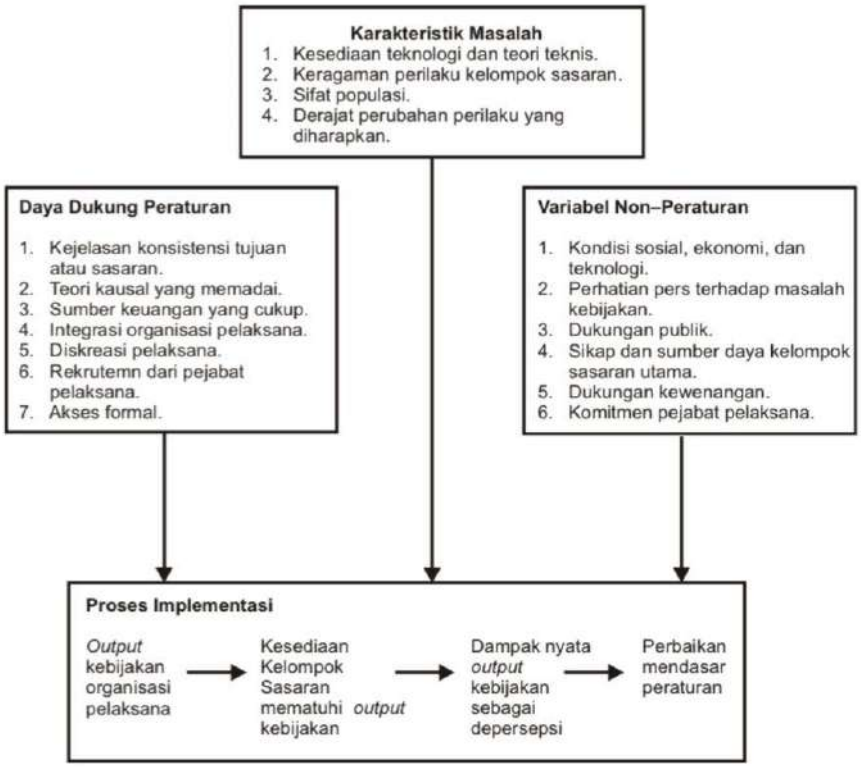
Sumber: (Anggara, 2014)

2) Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier

Model “A frameWork for implementation analysis” yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier menekankan pentingnya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Tiga variabel utama yang mempengaruhi:

a) Seberapa mudah atau sulitnya suatu masalah dapat ditangani dan dikendalikan.
b) Kemampuan kebijakan dalam merancang proses implementasi yang jelas dan terstruktur.
c) Pengaruh berbagai faktor politik terhadap tingkat dukungan terhadap kebijakan tersebut.

Gambar 2
Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier



Sumber: (Anggara, 2014)

3) Menurut George C. Edwards III

Menurut Edwards III, implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan yang menjembatani perumusan kebijakan dengan dampaknya pada masyarakat. Kebijakan bisa gagal jika tidak dirancang dengan baik, meskipun diterapkan secara optimal. Sebaliknya, kebijakan yang baik pun bisa tidak efektif jika implementasinya lemah.

Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

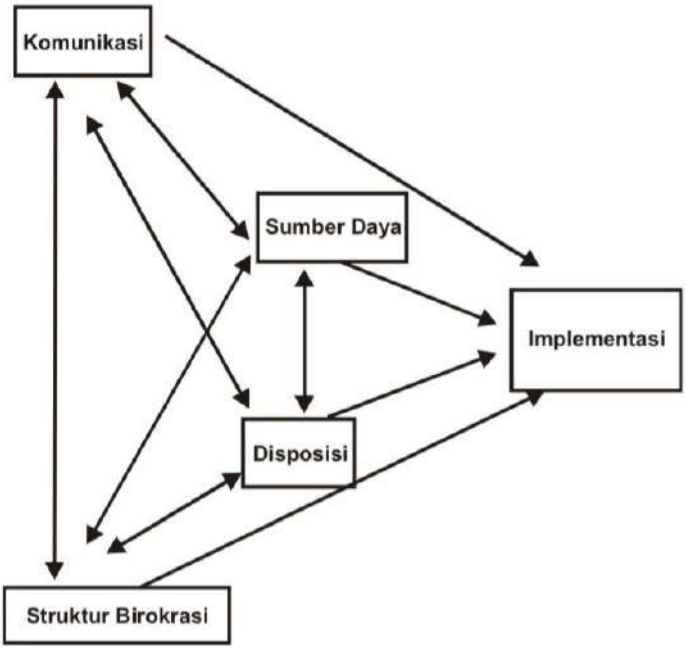
a) Komunikasi: Kejelasan dan konsisten dalam menyampaikan kebijakan.

b) Sumber Daya: Ketersediaan dana, tenaga, dan alat pendukung.

c) Disposisi: Komitmen dan kesiapan pihak yang menjalankan kebijakan.

d) Struktur Organisasi: Sistem dan prosedur yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

Gambar 3
Model Implementasi Kebijakan Edward III



Sumber: (Anggara, 2014)

3. Stunting

a. Definisi Stunting

Stunting adalah gangguan gizi kronik yang terjadi dari sejak ibu hamil sampai anak usia 2 tahun, yang ditandai dengan tinggi badan menurut umur berbeda di kurva merah ke bawah (-2 standar deviasi kebawah) yang mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan otak anak tidak optimal baik fisik maupun mental. Menurut Kementrian kesehatan Republik Indonesia, Stunting pada anak dapat diidentifikasi dengan mengukur tinggi atau panjang badan anak, lalu dibandingkan dengan ukuran standar. Namun, setiap kelompok usia memiliki patokan yang berbeda. Di indonesia,

Stunting biasanya diukur menggunakan tiga indikator, yaitu berat badan dibandingkan dengan tinggi badan(BB/TB), tinggi badan dibandingkan dengan usia (TB/U), dan berat badan dibandingkan dengan usia (BB/U) (Nurdiansyah et al., 2024).

b. Penyebab Stunting

Penyebab utama stunting adalah malnutrisi dalam jangka waktu lama. Kekurangan zat gizi penting seperti protein, zat besi, dan vitamin selama masa kehamilan dapat menghambat pertumbuhan anak. Selain itu, pola asuh yang kurang tepat, seperti tidak memberikan ASI eksklusif atau makanan pendamping ASI (MPASI) yang bergizi, juga penyebab stunting terjadi. Kondisi ini makin parah jika anak tinggal dilingkungan yang buruk dan terbatasnya akses air bersih, yang menyebabkan anak rentan terserang penyakit, seperti diare, sehingga gizi yang masuk ke tubuh tidak dapat diserap dengan baik. Selain itu, minimnya akses terhadap layanan kesehatan membuat ibu hamil dan anak tidak mendapatkan pemeriksaan atau penanganan yang sesuai. Faktor ekonomi juga mempengaruhi, karena keluarga dengan penghasilan rendah cenderung kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dan perawatan kesehatan anak secara optimal (Candra, 2020).

c. Dampak Stunting

Stunting bukan hanya soal anak bertubuh pendek, tapi juga memberikan dampak serius bagi anak-anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang pada kesehatan dan kemampuan anak di masa depan. Anak yang mengalami stunting sering mengalami keterlambatan perkembangan otak dan daya tahan tubuhnya cenderung lemah, sehingga mudah terserang penyakit.

Dan juga, stunting mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu negara karena generasi yang stunting cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih rendah (Hartati & Wahyuningsih, 2021).

Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak fase awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Dampaknya tidak hanya terlihat pada postur tubuh yang pendek, tetapi juga membawa berbagai konsekuensi negatif lainnya bagi anak. Berdasarkan survei tahun 2019, sekitar 30% balita di Indonesia mengalami stunting. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga. Pencegahan stunting sangat krusial karena dampaknya bersifat jangka panjang, sulit diperbaiki, dan dapat menghambat masa depan anak.(Fathmawati et al., 2022)

Ada 2 macam intervensi yang dapat dilakukan dalam pencegahan stunting, yaitu:

1. Intervensi spesifik, yaitu yang mengatasi secara langsung penyebab utama stunting, terutama terkait gizi. Berfokus pada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-2 tahun (periode 1.000 HPK).
2. intervensi sensitif, yaitu mengatasi secara tidak langsung penyebab stunting. Seperti mendukung faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya stunting, baik yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Faktor yang memiliki pengaruh langsung antara lain adalah kurangnya asupan gizi selama masa kehamilan, tidak diberikan ASI secara eksklusif, serta kurangnya pemberian imunisasi dan vitamin. Sementara, faktor secara tidak langsung meliputi

rendahnya pendidikan ibu, kondisi ekonomi yang terbatas, akses fasilitas kesehatan yang kurang memadai, sanitasi lingkungan buruk dan pola asuh yang kurang tepat. Walaupun tidak secara langsung menyebabkan stunting faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya stunting pada anak.Stunting memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembang anak

4. Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting

Kebijakan penurunan *Stunting* merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menangani masalah gizi kronis yang berdampak pada tumbuh kembang anak. Salah satu kebijakan utama di tingkat nasional adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penanganan stunting dilakukan melalui pendekatan intervensi spesifik dan sensitif, dengan sasaran prioritas seperti remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-59 bulan.

Peraturan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program penurunan stunting secara terintegrasi. Pada pasal 9 tentang Strategi nasional mencakup lima pilar utama:

a. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan pemerintah daerah.
b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat
c. Peningkatan konvergensi pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat dan
d. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.

Pada tingkat daerah, implementasi kebijakan ini diwujudkan dalam pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di setiap level pemerintah, mulai dari provinsi hingga kelurahan. Pemerintah Kota Makassar menindaklanjuti kebijakan nasional ini dengan menetapkan Peraturan Wali Kota

Makassar Nomor 96 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam peraturan ini, diatur peran perangkat daerah, Kecamatan, kelurahan, kader kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat pelaksanaan program penurunan stunting secara maksimal.

Kebijakan tersebut menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan program pencegahan stunting di Kota Makassar, termasuk di Kecamatan Makassar. Kebijakan ini diharapkan mempercepat penurunan angka Stunting dengan memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang baik, dengan adanya kebijakan yang jelas dan terarah, seluruh pihak dapat bekerja secara terkoordinasi untuk menurunkan angka stunting secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 96 Tahun 2023 pada pasal 11 ayat (1) berbunyi “Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kecamatan, dibentuk tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan.” Yang bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

B. Tinjauan Pustaka terkait Karya

1. Policy Brief

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 mengenai pedoman penulisan karya ilmiah untuk analis kebijakan, Risalah kebijakan (policy brief) merupakan sebuah tulisan ilmiah yang singkat dan terfokus pada isu kebijakan tertentu. Tulis ini juga memberikan alternatif solusi untuk permasalahan kebijakan yang harus segera ditangani oleh para pengambil keputusan (Republik Indonesia, n.d.).

2. Tujuan Policy Brief

Berdasarkan peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Policy brief bertujuan untuk menyajikan rekomendasi kebijakan secara singkat, jelas, dan berbasis bukti kepada para pengambil keputusan. Dokumen ini membantu mereka dalam memahami suatu permasalahan dengan cepat, memepertimbangkan berbagai alternatif, solusi, serta menentukan langkah yang efektif. Dengan format yang ringkas dan terstruktur, policy brief dirancang agar mudah dipahami dan dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan yang tepat serta memberikan dampak nyata.

3. Sistematika Penyusunan Policy Brief

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang sistematika penyusunan policy brief yang diatur dalam pedoman yang memiliki beberapa komponen-komponen, yaitu:

a. Judul

   Judul harus menarik perhatian sehingga pembaca merasa penasaran dan tertarik untuk membaca lebih lanjut. Dibuat secara singkat dan jelas mewakili substansi isi penelitian.

b. Ringkasan Eksekutif

   Bagian ini dimulai dengan pernyataan singkat yang mencakup faktor-faktor terkait fokus masalah, untuk mengetahui

c. Pendahuluan

   Berisi penjelasan mengenai isu yang diangkat, dilengkapi dengan data relevan yang mendukung penelitian. Bagian ini juga mencakup mengenai urgensi dan tujuan dari topik yang dibahas.

d. Deskripsi Masalah

Menyajikan inti permasalahan yang disertai bukti nyata, dengan analisis yang menunjukkan dampak dari permasalahan.

e. Rekomendasi

Berisi solusi untuk permasalahan yang diangkat, yang dimana solusi tersebut sesuai dengan kapasitas pemangku kepentingan dan didukung oleh faktor-faktor yang ada, serta mencakup kebijakan alternatif.

f. Apendiks (jika diperlukan)

g. Referensi utama

C. Kerangka Pikir

Stunting masih menjadi permasalahan kesehatan yang cukup serius di Kota Makassar. Meskipun berbagai program dan kebijakan telah diterapkan, angka Stunting masih tinggi di Kota Makassar. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan mungkin belum optimal. Stunting tidak hanya berdampak pada fisik anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan produktivitas jangka panjang, sehingga menjadi permasalahan yang perlu segera diatasi. Untuk menekan angka Stunting, Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 96 Tahun 2023 tentang percepatan penurunan Stunting. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat penurunan angka Stunting dengan melibatkan berbagai sektor.

Penelitian ini menggunakan model Van Meter dan Van Horn yang menetapkan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Melalui analisis ini peneliti bertujuan mengidentifikasi kendala dalam Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun 2023, yang menyebabkan angka Stunting di Kecamatan Makassar masih tinggi. Hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program dan menurunkan angka Stunting secara signifikan.

Gambar 4
Kerangka Pikir



Sumber: Anggaras (2014)

Definisi Operasional:

a) Standar dan tujuan kebijakan: Menilai seberapa jelas dan realistis standar serta tujuan kebijakan penanganan stunting. Dengan melakukan wawancara dengan Pelaksana kebijakan penanganan stunting mengenai pemahaman terkait sasaran dan tujuan kebijakan. Selain itu, dilakukan studi dokumen Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 96 Tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting untuk melihat sejauh mana sasaran dan tujuan kebijakan telah dirumuskan secara jelas dan dipahami oleh para pelaksana.
b) Sumber daya kebijakan: Mencari tahu ketersediaan sumber daya, seperti anggaran, tenaga pelaksana, maupun fasilitas untuk

mendukung program penanganan stunting. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas gizi Puskesmas dan kader mengenai kendala dalam tenaga kesehatan. Dan juga, melakukan observasi terkait kondisi dilapangan (kualitas pelayanan di posyandu).

c) Karakteristik agen pelaksana: Melihat bagaimana para pelaksana kebijakan, seperti kader, petugas gizi Puskesmas, dan aparat Kecamatan , menjalankan perannya dalam penanganan stunting. Penelitian ini menggali pengalaman, pelatihan yang pernah mereka ikuti, serta sejauh mana mereka memiliki semangat dan tanggung jawab dalam bekerja. Selain itu, peneliti juga mengamati cara mereka bekerja di lapangan dan bagaimana mereka berhubungan dengan masyarakat.

d) Komunikasi antar organisasi: Melihat sejauh mana koordinasi dan komunikasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan stunting berjalan dengan baik. Wawancara dilakukan dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, DPPKB, dan Kantor Kecamatan untuk mengetahui bagaimana cara mereka saling menyampaikan informasi, apakah mereka rutin melakukan rapat bersama, dan bagaimana sistem pelaporan yang digunakan. Selain itu, peneliti juga memeriksa dokumen seperti notulen rapat, SOP penanganan stunting di Puskesmas , dan laporan kegiatan untuk memastikan apakah informasi yang disampaikan sesuai dan tidak membingungkan.

e) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik: Melihat bagaimana faktor-faktor di luar program, seperti budaya, kondisi ekonomi keluarga, dan dukungan dari lingkungan sekitar, mempengaruhi pelaksanaan

kebijakan penanganan stunting. Data diperoleh melalui wawancara dengan orang tua anak stunting, masyarakat, dan kader untuk mengetahui kebiasaan pemberian makan anak, pemahaman orang tua tentang gizi, serta kendala ekonomi yang mereka hadapi. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung ke lingkungan tempat tinggal masyarakat untuk melihat kondisi nyata di lapangan.

f) Disposisi pelaksana: Melihat sejauh mana sikap dan pandangan para pelaksana kebijakan terhadap program penanganan stunting. Wawancara dilakukan dengan kader, petugas Puskesmas, dan aparat Kecamatan untuk mengetahui apakah mereka mendukung program ini, percaya bahwa program ini bisa berhasil, serta apakah mereka punya semangat dan inisiatif sendiri atau justru merasa kurang termotivasi.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun 2023, yang menjadi dasar kebijakan penanganan Stunting di Kecamatan Makassar. Dalam model ini ada enam variabel utama yang saling berkaitan, yaitu tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kerjasama berbagai pihak dan pelaksana di lapangan. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat digunakan untuk memberikan solusi atau rekomendasi kebijakan yang tepat dan sesuai kebutuhan, agar penanganan Stunting dapat berjalan lebih efektif dan angka stunting bisa turun secara signifikan.